



DIPLOMASI:
Sultan Hamengku
Buwono IX saat
Konferensi Inter
Indonesia I di
Yogyakarta.

KONFERENSI INTER INDONESIA I DI YOGYAKARTA

Teguhkan Konsensus 17 Agustus 1945

Yogyakarta memiliki peran istimewa bagi Republik Indonesia. Ketika pemerintahan belum mapan, pada 1949 diselenggarakan Konferensi Inter Indonesia I. Konferensi ini menyepakati hal-hal penting bagi tegaknya Republik Indonesia.

SUASANA Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga 1949 belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 1949, ada sejumlah peristiwa yang harus disikapi oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya yakni menyiapkan delegasi untuk mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB).

Saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sudah kembali berada di Yogyakarta. Mereka sebelumnya diasingkan oleh Belanda.

Maka, dirancanglah delegasi yang bakal mewakili Indonesia dalam forum tersebut. Begitu pemerintah Indonesia berfungsi kembali, disusunlah delegasi Indonesia ke KMB. Diputuskan menunjuk Mohammad Hatta untuk memimpin delegasi.

Meski demikian, posisi Indonesia tetap harus diperkuat. Dalam rangka itu, diselenggarakan sebuah konferensi khusus. Yakni, Konferensi Inter Indonesia.

Konferensi ini dilaksanakan di dua tempat. Pertama, di Yogyakarta pada 19-21 Juli 1949. Kedua, di Jakarta pada 31 Juli sampai 2 Agustus 1949.

Konferensi Inter Indonesia adalah konferensi yang dilakukan antara Negara Indonesia dan

Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO/Badan Permusyawaratan Federal). BFO merupakan sebuah badan yang merupakan kumpulan negara-negara bagian membentuk Belanda.

Saat itu, di Indonesia ada banyak negara membentuk Belanda. Belanda memiliki maksud khusus dalam pembentukan negara BFO. Belanda bermaksud menguasai kembali Indonesia. Negara bentuk itu terdiri dari 16 negara dan dibagi ke dalam tiga kawasan kekuasaan.

Daerah kekuasaan pertama yaitu mencakup Pasundan, Indonesia, Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Madura, Sumatera Selatan, dan Sumatera Timur.

Daerah kekuasaan kedua meliputi Riau, Jawa Tengah, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Banjarmasin. Sedangkan daerah kekuasaan ketiga terdiri dari wilayah Indonesia yang tidak masuk ke dalam negara bagian.

Konferensi Inter Indonesia adalah konferensi yang melibatkan pemerintah Republik Indonesia dan BFO.

Konferensi Inter Indonesia I dan Konferensi Inter Indonesia II merupakan momentum penting untuk menciptakan kesamaan pandangan dalam menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi tersebut diselenggarakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.

Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta dipimpin oleh Mohammad Hatta. Konferensi Inter Indonesia II dipimpin Sultan Hamid selaku ketua BFO. Sedangkan wakil negara-negara bagian dipimpin Gubernur Jenderal Belanda Hubertus Johannes Van Mook.

Fokus pembicaraan dalam Konferensi Inter Indonesia ini terkait pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Persoalan yang dibahas

antara lain tata susunan dan hak pemerintah RIS. Selain itu, kerja sama antara RIS dan Belanda dalam bentuk Perserikatan Uni.

Konferensi Inter Indonesia di Yogyakarta berhasil menyepakati lima hal. Pertama, Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. Kedua, Merah-Putih adalah bendera kebangsaan. Ketiga, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan. Keempat, bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia. Kelima, 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan.

Secara umum, hasil yang disepakati dalam Konferensi Inter Indonesia I ini merupakan penekanan dari konsensus nasional sejak 17 Agustus 1945. Konsensus nasional itu diimplementasikan dalam perjuangan bangsa.

Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta usai, dilanjutkan Konferensi Inter Indonesia II di Jakarta. Konferensi ini bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta.

Ada sejumlah kepekatian penting yang berhasil dicapai. Salah satunya BFO mendukung penuh tuntutan yang diajukan Republik Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan politik ataupun ekonomi.

Konferensi juga memutuskan sejumlah hal penting lainnya. Ada tiga keputusan terkait bidang militer atau pertahanan. Pertama, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional. Kedua, TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL, dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih lanjut. Ketiga, pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri. (*)



SELARAS: Mohammad Hatta dan Sri Sultan HB IX di sela Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta.



SEPAKAT: Peserta Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta.

Sultan HB IX Tandatangani Pengakuan Kedaulatan

KONSENSUS yang disepakati dalam Konferensi Inter Indonesia I di Yogyakarta dan Konferensi Inter Indonesia II di Jakarta bermakna istimewa. Kesepakatan tersebut menjadi modal politik yang sangat kuat untuk menghadapi Belanda dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB).

KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Konferensi berlangsung lebih dari sepekan, mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949.

KMB dilaksanakan setelah dilakukan sejumlah perundingan diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Perundingan-perundingan tersebut antara lain Perundingan Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Roijen (1949). KMB diselenggarakan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan Indonesia.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam KMB. Yakni, Indonesia, Belanda, dan United Nations Commissioner for Indonesia (UNCI) yang bertindak sebagai penengah.

Delegasi Indonesia diketuai Mohammad Hatta dengan dua belas anggota. Mereka adalah Moh Roem, Prof Dr Mr Supomo, Dr J. Leitmerna, Mr Ali Sastroamicijoyo, Ir Djuanda,

Dr Sukiman, Mr Suyono Hadinoto, Dr Sumitro Djojohadikusumo, Mr Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr Muwardi.

Delegasi Belanda diwakili BFO dengan dipimpin Sultan Hamid II. Mereka mewakili sejumlah negara yang dibentuk Belanda di Indonesia. Sedangkan perwakilan Belanda dipimpin Mr van Maarseveen dan delegasi UNCI diwakili Thomas Chritchley.

Perdebatan-perdebatan terjadi antara delegasi Republik Indonesia dan Belanda. Perdebatan berlangsung sengit.

Sedangkan delegasi Republik Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO/Badan Permusyawaratan Federal) berjalan selaras. Keduanya bekerja sama dengan baik. Keduanya tak terlibat perdebatan.

Sebab, delegasi Republik Indonesia dan BFO sudah mencapai kesepakatan pada Konferensi Inter Indonesia I dan Konferensi Inter Indonesia II.

Kesepakatan yang diraih dalam Konferensi Inter Indonesia I dan Konferensi Inter Indonesia II sangat membantu untuk pembahasan-pembahasan di KMB. Ketika pemba-



REPUBLIK: Konferensi Inter Indonesia menjadi modal kuat dalam KMB.

hasan mengenai konstitusi Negara Indonesia Serikat, panitia kecil bidang konstitusi sangat terbantu dengan hasil kerja panitia teknis yang dibentuk saat Konferensi Inter Indonesia.

Panitia teknis telah menyusun draf konstitusi dengan terperinci. Draf tersebut dapat dibahas dalam KMB dengan lancar.

Ada sejumlah pokok penting yang tercapai di dalamnya. Yakni, terkait tata praja, susunan pemerintahan, perundang-undangan, dan hal

lain yang sudah disetujui dalam Konferensi Inter Indonesia.

KMB menghasilkan enam kesepakatan. Pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.

Keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubung-

an Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Keenam, tentara Kerajaan Belanda segera mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Usai KMB, Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden RIS. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada 16 Desember 1949.

Presiden Sukarno segera mengambil kebijakan. Dia berniat membentuk Kabinet RIS. Maka, ditunjuklah empat orang menjadi formatur pembentuk Kabinet RIS.

Keempat orang tersebut adalah Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Anak Agung Gde Agung, dan Sultan Hamid II. Keempat orang tersebut merepresentasikan keterwakilan masing-masing dua formatur dari pihak Republik Indonesia dan BFO.

Semangat yang tertuang dalam

konsensus nasional yang disepakati dalam Konferensi Inter Indonesia kembali muncul dalam Panitia Persiapan Nasional dan Penyusunan Kabinet RIS. Pada 20 Desember 1949, Presiden Soekarno melantik Kabinet RIS dengan komposisi yang memadukan perwakilan Republik Indonesia dan BFO. Bagi Republik Indonesia dan BFO, keberadaan RIS yang berdaulat dapat terwujud dengan melaksanakan konsensus yang telah disepakati.

Akhir Desember 1949, KMB menyatakan Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Pada 27 Desember 1949, diselenggarakan penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia tersebut di Belanda. Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr Willem Drees, Menteri J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Hatta.

Secara bersamaan, di Jakarta juga dilakukan penandatanganan serupa. Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Belanda diwakili Wakil Tertinggi Mahkota Johannes Lovink. Penandatanganan ini menegakan kedaulatan Indonesia. Indonesia pun berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS). (*)